

**BAB IV**  
**GAMBARAN UMUM PENELITIAN**

**4.1 Gambaran umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur**

**4.1.1 Sejarah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT**

Provinsi Nusa Tenggara Timur di bentuk pada tanggal 2 Desember 1958 berdasarkan undang-undang No. 64 Tahun 1958. Seiring dengan pembentukan Provinsi Nusa Tenggara Timur maka dibentuk pula perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk membantu tugas Gubernur Dalam bidang Pendidikan.

Berikut nama-nama Pimpinan Kepala Dinas yang pernah menjabat dan periode atau masa jabatan sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NIT :

**Tabel 4.1**  
**Daftar Nama Pimpinan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan**  
**Provinsi Nusa Tenggara Timur**

<b>No.</b>	<b>NAMA PEMIMPIN</b>	<b>TAHUN JABATAN</b>
1	I.H Doko	1958-1971
2	N.D. Dilak BA.	1971-1974
3	Drs. Titus Uly	1974-1976
4	Markus Pigawai M.SC	1976-1979
5	Drs. Soewono	1979-1984
6	Ignatius Saeparyo	1984-1987
7	Drs. Piet M. Syamta	1987-1988
8	Robert Riwu Kaho Bc	1988-1993
9	DIs. G.J. Manuputti	1993-1995
10	Drs. J. Carnelius Mbeo	1996-1998
11	Drs. Abraham	1998-2001
12	Drs. Ojohanis Manulangga, M.Si	2001-2006
13	Ir. Thobias Ully M.Si	2006-2008

<b>No.</b>	<b>NAMA PEMIMPIN</b>	<b>TAHUN JABATAN</b>
14	Drs. Clemes Meba, M.M	2008-2014
15	Drs. Sinun Petrus Manuk	2014-2016
16	Johana E. Lisapaly, S.H, M.Si	2016-2017
17	Drs. Benyamin Lola, M.Si	2017-2020
18	Linus lusi, S.Pa., M.Pd	2020-2021

Sebagai Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Penulisan sejarah singkat ini bermaksud untuk mengenang Bapak I.H Doko yang telah mendarmabaktikan dirinya kepada nusa dan bangsa terutama di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan di Nusa Tenggara Timur. Jiwa dan semangat pengabdian almarhum dapat berguna bagi surituladan untuk generasi muda di Nusa Tenggara Timur dan masyarakat pada umumnya. Sebagai wujud kepedulian dan rasa terima kasih kita atas jasa dan pengabdiannya maka di bangunlah sebuah monumen torso di L.H. Doko.

#### **4.1.2 Visi, Misi dan Tupoksi Dinas**

##### a. Visi

NTT bangkit mewujudkan masyarakat sejahtera dalam bingkai NKRI.

##### b. Misi

1. Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil
2. Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pembangunan Pariwisata Nasional (Ring Of Beauty).
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan
4. Meningkatkan sumber daya kualitas manusia, dan
5. Mewujudkan reformasi birokrasi terutama dalam Bidang Pendidikan.

c. Tugas pokok kantor

Mengacu pada peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, tugas pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P & K) Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintah bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

d. Fungsi pokok kantor

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan kebijakkan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan
- b) Pelaksanaan kebijakkan di bidang pendidikan dan kebudayaan
- c) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pendidikan dan kebudayaan
- d) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan kebudayaan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

## **4.2 Dasar Hukum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Dasar hukum penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- 2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- 4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025
- 5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
- 6) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 7) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Kemajuan Kebudayaan
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2013 tentang Pencatatan Warisan Budaya Tak Benda
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 12) Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Perubahan Rencana pembangunan jangka panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana kerja Pemerintah Daerah

- 13) Peraturan Bersama 3 Menteri Nomor 41 dan 43 Tahun 2009 tentang Pedomaan Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
- 15) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011)
- 16) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023
- 17) Peraturan Daerah tentang Strukur organisasi Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019
- 18) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 5 tahun 2019 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Gambar 4.1

Struktur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur

